NEWSLETTER

APBNKiTA

KINERJA DAN FAKTA | MEI | 2026



EKONOMI TUMBUH, FISKAL TERJAGA

Daya Beli Tetap Solid, Pendapatan Negara Menguat

Foto: Pexels - Rossy Rostiawati

#KATAMENTERIKITA

Kondisi ekonomi Indonesia tetap menunjukkan fondasi yang terjaga. Fiskal tetap terkendali, sementara pertumbuhan ekonomi bergerak lebih cepat. Ke depan, pendapatan negara akan tumbuh lebih cepat lagi karena reformasi dan restrukturisasi yang kita lakukan sudah memberikan hasil yang positif.




Foto: Pexels-Tom Fisk

Ekonomi Domestik Tetap Solid

Momentum Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global

Indonesia memasuki Triwulan II 2026 dengan fondasi ekonomi yang kuat. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% (yoy), ditopang konsumsi masyarakat, investasi, dan akselerasi belanja Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di antara beberapa negara G20 dan ASEAN, sekaligus menunjukkan daya tahan ekonomi domestik yang tetap terjaga di tengah tekanan global yang belum sepenuhnya mereda. Fondasi yang kuat pada awal tahun tersebut menjadi bekal penting untuk menjaga kesinambungan momentum pertumbuhan ke depan.

Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% (yoy) pada Triwulan I 2026, menunjukkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Pada saat yang sama, konsumsi Pemerintah yang tumbuh 21,8% (yoy) menegaskan peran APBN sebagai katalis aktivitas ekonomi. Dengan belanja yang dieksekusi lebih cepat dan terarah, aktivitas ekonomi diharapkan bergerak lebih cepat dan tidak terkonsentrasi di akhir tahun, sehingga dampak penggandanya terhadap perekonomian menjadi lebih optimal.

Sejumlah indikator menunjukkan aktivitas ekonomi tetap terjaga di tengah normalisasi pola konsumsi pasca Ramadan dan Idulfitri. Mandiri Spending Index termoderasi pada April ke level 122,1, terutama ditopang belanja *consumer goods*, diikuti elektronik dan *leisure*. Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menguat ke level 123,0 dari 122,9 pada Maret, mencerminkan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang tetap positif. Hal ini menunjukkan optimisme terhadap prospek ekonomi domestik masih terjaga.

Aktivitas sektor riil tetap menunjukkan pergerakan yang positif. Hal ini tercermin dari konsumsi listrik yang tumbuh tinggi, baik pada sektor rumah tangga, bisnis, maupun industri. Di saat yang sama, konsumsi semen domestik meningkat signifikan sejalan dengan percepatan pelaksanaan program prioritas Pemerintah, khususnya pembangunan fisik dan infrastruktur.

Mobilitas dan aktivitas masyarakat yang kembali normal pasca libur Lebaran turut mendorong permintaan domestik. Hal ini tercermin dari penjualan kendaraan bermotor yang meningkat signifikan pada April 2026, dengan penjualan mobil tumbuh 55,0% (yoy) dan sepeda motor 28,1% (yoy). Perkembangan ini menunjukkan permintaan domestik dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Terjaganya konsumsi dan mobilitas masyarakat tersebut juga ditopang oleh stabilitas harga yang semakin baik.

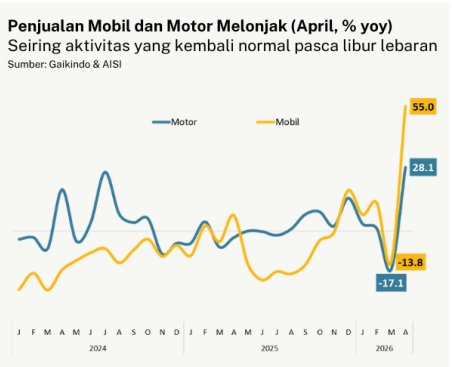

Inflasi Melandai, Daya Beli Tetap Terjaga

Inflasi April 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy), menunjukkan tekanan harga yang mulai mereda dibandingkan Triwulan I 2026 dan tetap berada dalam sasaran inflasi Bank Indonesia. Di antara negara-negara *peers*, posisi

inflasi Indonesia termasuk yang paling terkendali — jauh di bawah Filipina, Vietnam, maupun Amerika Serikat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap dapat dijaga di tengah ketidakpastian global. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga, termasuk mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026. Langkah ini dilakukan untuk menahan transmisi kenaikan harga energi global agar tidak langsung membebani masyarakat dan perekonomian domestik.

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Indonesia Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain

Sumber: BPS, Trading Economics

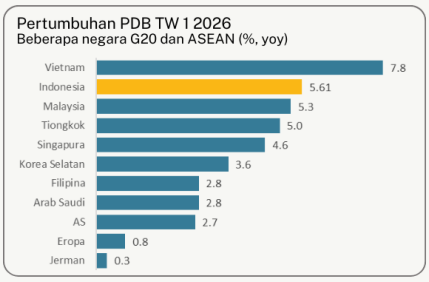

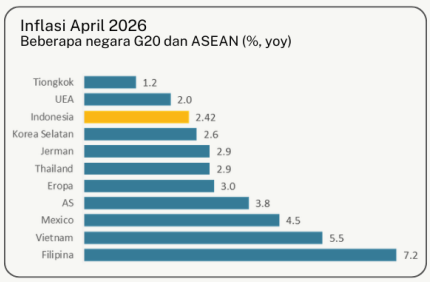

Risiko Global Masih Perlu Diwaspadai

Meski indikator domestik tetap solid, Pemerintah terus mencermati perkembangan kondisi global yang masih diwarnai ketidakpastian. Konflik geopolitik di Timur Tengah belum sepenuhnya menemukan titik terang, sehingga risiko gangguan rantai pasok dan lonjakan harga energi masih perlu diwaspadai. Di sisi lain, dinamika perdagangan global juga terus berkembang, terutama terkait arah kebijakan tarif dan hubungan dagang antarnegara besar.

Pada saat yang sama, arah kebijakan moneter Amerika Serikat kembali menjadi perhatian. Ekspektasi penurunan suku bunga The Fed tahun ini mulai bergeser seiring tekanan inflasi di Amerika Serikat yang masih tinggi. Kondisi tersebut dapat memicu volatilitas pasar keuangan global, termasuk risiko arus modal keluar dari negara berkembang dan tekanan terhadap nilai tukar. Namun, dengan pertumbuhan yang tetap kuat, inflasi yang terkendali, dan aktivitas sektor riil yang terus berjalan, Indonesia memiliki fondasi yang cukup baik untuk menghadapi tekanan tersebut secara lebih terukur.

Komoditas Ekspor Menjadi Bantalan Alami (*Natural Hedge*)

Di tengah risiko kenaikan harga energi, Indonesia juga memiliki bantalan dari sisi komoditas ekspor. Ketidakpastian resolusi konflik di Timur Tengah membuat harga sejumlah komoditas tetap berada pada level relatif tinggi. Harga minyak Brent naik 20,7% (yoy), batu bara 19,5% (yoy), tembaga 38,4% (yoy), nikel 13,8% (yoy), CPO 5,6% (yoy), dan emas 61,2% (yoy). Bagi Indonesia, penguatan harga komoditas ekspor unggulan tersebut dapat menjadi *natural hedge* bagi perekonomian dan APBN. Harga komoditas yang kuat mendorong peningkatan ekspor dan menopang penerimaan negara, terutama pada sektor yang berbasis sumber daya alam, sehingga dapat mengimbangi dampak kenaikan harga energi global. Meski demikian, Pemerintah tetap menjaga kewaspadaan karena harga komoditas sangat dipengaruhi dinamika dan sentimen global. Oleh karena itu, pengelolaan APBN tidak hanya mengandalkan dukungan harga komoditas, tetapi juga terus diperkuat melalui optimalisasi penerimaan negara, efektivitas belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang pruden.

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tetap Sejalan

Perkembangan indikator makro lainnya hingga pertengahan Mei 2026 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih bergerak sesuai desain yang dirancang Pemerintah dalam APBN 2026. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I yang mencapai 5,61% berada di atas asumsi APBN 2026 sebesar 5,4%, sementara inflasi April sebesar 2,42% tetap sejalan dengan sasaran inflasi 2,5%. Hal ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan dan stabilitas harga masih dapat terjaga.

Sementara itu, nilai tukar Rupiah dan *yield* SBN bergerak mengikuti dinamika pasar keuangan global. Meski demikian, pergerakan nilai tukar Rupiah dan *yield* SBN masih *manageable* dan Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan serta kepercayaan investor.

Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia bergerak di atas asumsi APBN seiring ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu gangguan rantai pasok dan kenaikan harga energi global. Dalam kondisi tersebut, lifting minyak dan gas terus dioptimalkan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi dan memperkuat ketahanan fiskal. Ke depan, Pemerintah akan terus memantau pergerakan risiko global dengan seksama dan menjaga agar respon kebijakan dapat diambil dengan cepat dan akurat. Dalam situasi global yang sangat dinamis, APBN akan terus dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat serta tetap mempertahankan kredibilitas fiskal.

REALISASI INDIKATOR EKONOMI DIBANDINGKAN ASUMSI APBN 2026

Pertumbuhan Ekonomi (yoy)	5,4%	**5,61%** Triwulan I 2026
Inflasi (yoy)	2,5%	**2,42%** April 2026
Nilai Tukar	Rp16.500/USD	**Rp16.978/USD (ytd)** **Rp17.514/USD (eop)** 13 Mei 2026
Yield SBN 10 Tahun	6,9%	**6,47% (ytd)** **6,67% (eop)** 12 Mei 2026
Harga Minyak Mentah (ytd)	USD70/barel	**USD88,2/barel** April 2026
Lifting Minyak (barel/hari)	610 ribu	**535,8 ribu** Februari 2026
Lifting Gas (barel setara minyak/hari)	984 ribu	**957,9 ribu** Februari 2026

Sumber : Kemenkeu, BI, BPS, SKK Migas/ESDM



Foto: Tom Fisk

Kinerja APBN Tetap Solid dan Terukur

Pendapatan Tumbuh, Belanja Terakselerasi, Defisit Terkendali

Ketahanan ekonomi domestik hingga April 2026 turut ditopang oleh APBN yang bekerja dengan baik sebagai shock absorber sejak awal tahun. Di tengah tekanan global yang masih berlangsung, kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, menopang aktivitas ekonomi, dan memastikan program prioritas berjalan tepat waktu tanpa mengganggu kesehatan dan kredibilitas fiskal.

Hingga akhir April 2026, APBN menunjukkan kinerja yang solid. Pendapatan negara mencapai Rp918,4 triliun (29,1% dari target APBN), tumbuh 13,3% (yoy). Pertumbuhan tersebut terjadi secara merata pada seluruh komponen utama pendapatan negara, yaitu penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, dan PNBP. Kinerja ini didukung aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat, dukungan harga komoditas ekspor sebagai natural hedge, serta perbaikan administrasi penerimaan negara.

Pada saat yang sama, belanja negara mencapai Rp1.082,8 triliun (28,2% dari pagu) pada akhir April 2026, tumbuh 34,3% (yoy). Percepatan belanja ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah agar APBN bekerja secara optimal sejak awal tahun, sehingga aktivitas ekonomi dapat bergerak lebih cepat dan tidak terkonsentrasi di akhir tahun. Dengan demikian, dampak pengganda belanja negara terhadap perekonomian dan perlindungan masyarakat dapat menjadi lebih optimal.

APBN 2026 dirancang ekspansif dengan target defisit yang terukur. Hal ini merupakan manifestasi peran APBN sebagai instrumen *countercyclical* untuk mendorong pertumbuhan, melindungi daya beli masyarakat, dan memperkuat fondasi pembangunan jangka menengah. Pada April 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% PDB, menurun dibandingkan posisi Maret 2026 yang sebesar 0,93% PDB.

Keseimbangan primer juga berbalik dari defisit Rp95,8 triliun pada Maret menjadi surplus Rp28,0 triliun pada April, menunjukkan bahwa APBN tetap dijalankan dalam koridor disiplin fiskal yang terjaga.

Realisasi APBN hingga 30 April 2026

URAIAN (dalam Triliun Rupiah)	2025		2026		
	APBN	Realisasi April	APBN	Realisasi April	% thd APBN
PENDAPATAN NEGARA	3.005,1	810,5	3.153,6	**918,4**	29,1
PENERIMAAN PERPAJAKAN	2.490,9	656,8	2.693,7	746,9	27,7
Penerimaan Pajak	2.189,3	556,9	2.357,7	646,3	27,4
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	301,6	100,0	336,0	100,6	29,9
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	513,6	153,5	459,2	171,3	37,3
PENERIMAAN HIBAH	0,6	0,2	0,7	0,3	41,1
BELANJA NEGARA	3.621,3	806,2	3.842,7	**1.082,8**	28,2
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	2.701,4	546,7	3.149,7	826,0	26,2
Belanja K/L	1.160,1	253,6	1.510,5	400,5	26,5
Belanja non-K/L	1,541,4	293,1	1.639,2	425,5	26,0
TRANSFER KE DAERAH	919,9	259,4	693,0	256,8	37,1
KESEIMBANGAN PRIMER	(63,3)	173,9	(89,7)	**28,0**	(31,2)
DEFISIT ANGGARAN	(616,2)	4,3	(689,1)	**(164,4)**	23,9
% Defisit terhadap PDB	(2,53)	0,02	(2,68)	(0,64)	
PEMBIAYAAN ANGGARAN	616,2	281,2	689,1	**298,5**	43,3

Pajak Tumbuh Seiring Aktivitas Ekonomi yang Tetap Berjalan

Penerimaan pajak neto hingga April 2026 mencapai Rp646,3 triliun (27,4% target), tumbuh 16,1% (yoy) — melanjutkan tren pertumbuhan positif yang konsisten sejak awal tahun. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh jenis pajak utama, menggambarkan aktivitas ekonomi yang tetap berjalan di berbagai lini.

PPN dan PPnBM mencatat pertumbuhan tinggi (40,2% yoy), sejalan dengan konsumsi domestik yang tetap terjaga. PPh Orang Pribadi dan PPh 21 juga tumbuh kuat (25,1% yoy), menggambarkan penghasilan masyarakat, khususnya pekerja formal, yang masih bergerak positif sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja. Kinerja dua jenis pajak ini memberi sinyal bahwa konsumsi dan pendapatan masyarakat tetap kuat. PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 tumbuh 9,8% (yoy), menggambarkan aktivitas transaksi, perdagangan, dan pembayaran lintas negara yang tetap terjaga. PPh Badan juga tumbuh 5,1% (yoy), didukung kinerja sejumlah sektor yang tetap positif.

Dari sisi sektoral, mayoritas sektor utama penyumbang penerimaan pajak juga mencatat pertumbuhan positif. Sektor perdagangan tumbuh kuat dengan pertumbuhan neto 47,6% (yoy), terutama ditopang perdagangan besar BBM dan meningkatnya tren belanja online. Industri pengolahan tetap menjadi kontributor penting dengan pertumbuhan neto 8,4% (yoy), antara lain didukung subsektor minyak kelapa sawit yang profitabilitasnya meningkat. Sementara itu, sektor konstruksi dan real estat juga tumbuh positif (neto 0,8% yoy), sementara sektor pertambangan mulai membaik (neto 6,8% yoy) didukung kinerja subsektor migas.

Selain ditopang aktivitas ekonomi, kinerja penerimaan pajak juga didukung implementasi Coretax yang semakin baik. Sistem administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan data, pelayanan, pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak. Perbaikan ini penting bukan hanya untuk mendukung penerimaan jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi sistem perpajakan yang lebih sehat, modern, dan berkelanjutan.



Foto: Kementerian Keuangan

Kepabeanan dan Cukai Mulai Mencatat Titik Balik

Kinerja kepabeanan dan cukai juga menunjukkan perbaikan. Hingga April 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100,6 triliun (29,9% target), tumbuh 0,6% (yoy). Meski pertumbuhannya masih terbatas, capaian ini menjadi sinyal positif karena secara kumulatif mulai berbalik tumbuh setelah sebelumnya mengalami kontraksi hingga Maret 2026.

Perbaikan tersebut ditopang oleh beberapa faktor. Penerimaan cukai tumbuh 2,2% (yoy) seiring peningkatan produksi rokok pada Triwulan I 2026. Bea masuk tetap tumbuh positif sebesar 6,4% (yoy), didukung peningkatan impor LPG dan kebutuhan proyek, yang juga mengindikasikan aktivitas investasi dan pembangunan yang terus berjalan. Sementara itu, bea keluar masih terkontraksi 17,5% (yoy), namun tekanannya mulai mereda sejalan dengan penguatan harga CPO pada Maret dan April.

Fungsi pengawasan kepabeanan dan cukai juga terus diperkuat. Hingga April 2026, penindakan rokok ilegal meningkat menjadi 5.451 kali, dengan jumlah rokok ilegal yang diamankan mencapai 684 juta batang. Penindakan narkotika juga terus diintensifkan, dengan 522 penindakan dan 3,31 ton barang bukti. Salah satu capaian penting adalah keberhasilan tim gabungan Bea Cukai dan Polri menggagalkan penyelundupan narkotika selama dua hari berturut-turut di Pelabuhan Bakauheni. Hal ini dilakukan untuk menjaga ruang penerimaan negara dari kebocoran sekaligus melindungi pelaku usaha yang patuh dari persaingan yang tidak adil.

PNBP Menguat Ditopang Komoditas dan Layanan Publik

Hingga 30 April 2026, realisasi PNBP mencapai Rp171,3 triliun (37,3% target), tumbuh 11,6% (yoy). Tanpa mempertimbangkan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), PNBP tumbuh lebih tinggi, yaitu sebesar 20,0% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja PNBP tetap kuat meskipun dividen BUMN telah dialihkan ke Danantara. Capaian ini ditopang kinerja di sektor sumber daya alam maupun layanan publik.

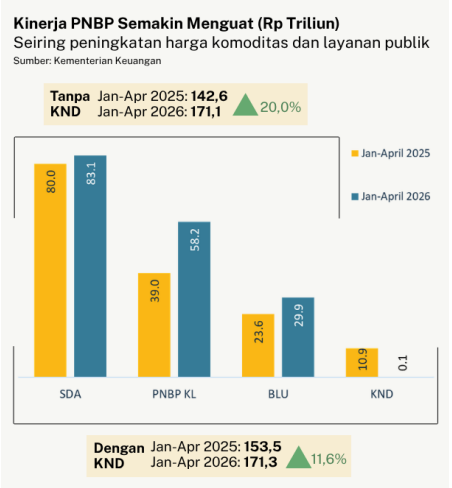

Di sektor sumber daya alam, PNBP mencapai Rp83,1 triliun, tumbuh 3,9% (yoy), terutama ditopang kenaikan harga mineral seperti nikel, tembaga, emas, perak, dan aluminium. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan peran komoditas ekspor sebagai bantalan alami (*natural hedge*) di tengah tingginya harga energi global.

PNBP K/L tumbuh lebih tinggi sebesar 49,2% (yoy), terutama berasal dari pendapatan jasa komunikasi dan informasi serta denda administratif di bidang kehutanan. Sementara itu, pendapatan BLU tumbuh 26,6% (yoy), didukung kenaikan pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada Kementerian Kesehatan serta tarif pungutan ekspor CPO dan turunannya.


Foto: Muhamad Guruh Budi H

Belanja Pemerintah Pusat Dipercepat untuk Melindungi Masyarakat dan Menjaga Pertumbuhan

Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp826,0 triliun (26,2% pagu), tumbuh 51,1% (yoy), mengalami akselerasi sejalan dengan desain APBN yang ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenaikan ini ditopang Belanja K/L yang mencapai Rp400,5 triliun untuk menjalankan program prioritas dan layanan publik, serta Belanja non-K/L sebesar Rp425,5 triliun yang dioptimalkan untuk menjaga daya beli, memenuhi kewajiban negara, dan meredam tekanan harga.

Realisasi belanja K/L mencapai 26,5% pagu dan tumbuh sebesar 57,9% (yoy) didukung peningkatan pada seluruh komponen utama belanja. Belanja pegawai meningkat antara lain dipengaruhi pengangkatan ASN baru dan penyaluran THR, serta akselerasi pembayaran tunjangan pendidik non-PNS. Realisasi belanja barang tumbuh signifikan terutama untuk pelaksanaan MBG, Dana BOS, insentif biodiesel, pelayanan kesehatan UPT, dan stabilisasi pangan. Belanja modal juga meningkat, utamanya untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk pembangunan jaringan dan irigasi.

Selain itu, belanja bansos tetap diarahkan untuk melindungi kelompok masyarakat rentan. Hingga April 2026, bantuan sosial telah disalurkan antara lain melalui program PKH untuk 9,7 juta keluarga, Kartu Sembako untuk 17,5 juta keluarga, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Negara untuk 96,7 juta jiwa, Program Indonesia Pintar untuk 2,9 juta siswa, serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 863,3 ribu mahasiswa.

Proses penyaluran bansos juga terus ditingkatkan dengan mengedepankan perbaikan kualitas data penerima manfaat. Dengan basis data yang semakin akurat, penyaluran belanja perlinsos diharapkan semakin tepat sasaran dan memberi manfaat langsung kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Realisasi belanja non-K/L mencapai Rp425,5 triliun (26,0% APBN), tumbuh 45,2% (yoy), dipengaruhi pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi BBM dan listrik. Di tengah harga energi global yang masih bergejolak, subsidi dan kompensasi menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan dampak kenaikan harga energi global terhadap harga domestik.

TKD Membaik, Dukungan untuk Daerah Terus Diperkuat

Transfer ke Daerah hingga April 2026 mencapai Rp256,8 triliun (37,1% pagu). Kecepatan penyaluran tahun ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 29,8% pagu, terutama didorong oleh penyaluran DBH, DAU, DAK Nonfisik, dan Dana Otsus.

Dukungan APBN kepada daerah juga diperkuat melalui relaksasi penyaluran dan tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana di Sumatera. Tambahan alokasi TKD 2026 sebesar Rp10,65 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah disalurkan hampir seluruhnya. Sementara itu, tambahan dana Otsus Aceh telah disalurkan untuk Tahap I sebesar Rp30,39 M (40% dari alokasi). Penyaluran Tahap II sebesar Rp22,79 M akan disalurkan pada bulan Mei dan Tahap III sebesar Rp22,79 M akan dilakukan pada bulan Juni.

Peningkatan Harga Ditahan, Daya Beli Dijaga

Di tengah tekanan harga minyak global, Pemerintah menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil. Kebijakan ini berfungsi sebagai *shock absorber* agar tekanan tersebut tidak langsung berpindah menjadi beban masyarakat—baik melalui kenaikan biaya transportasi, kebutuhan rumah tangga, maupun biaya produksi.

Hingga April 2026, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp153,1 triliun (34,3% pagu). Realisasi subsidi dan kompensasi meningkat seiring penguatan perlindungan daya beli masyarakat, dipengaruhi fluktuasi ICP dan nilai tukar, pembayaran uang muka subsidi pupuk, serta perubahan mekanisme pembayaran kompensasi. Volume penyaluran barang bersubsidi juga meningkat, menunjukkan bahwa jangkauan perlindungan semakin luas.

Pemerintah Menjaga Ketersediaan barang dengan harga bersubsidi

Barang Subsidi	Realisasi	Growth
BBM (ribu KL)	4.704,6 4.349,5	8,2%
LPG 3 Kg (juta Kg)	2.152,8 2.076,9	3,7%
Listrik bersubsidi (juta pelanggan)	42,9 42,0	2,2%
Pupuk (juta ton)	2,9 2,3	25,2%
Debitur KUR (juta debitur)	1,54 1,51	1,4%

2025 2026

Mulai 2026, mekanisme pembayaran kompensasi energi juga diperbaiki melalui PMK Nomor 73 Tahun 2025. Jika sebelumnya kompensasi BBM dan listrik dibayarkan setelah audit BPKP setiap tiga bulan, kini 70% dari nilai kompensasi hasil reviu Inspektorat Jenderal dibayarkan setiap bulan kepada Pertamina dan PLN. Sementara itu, sisa 30% diselesaikan setelah hasil audit BPKP keluar pada September tahun berjalan.

Perubahan ini dilakukan untuk membantu memperbaiki arus kas dan efisiensi keuangan kedua BUMN tersebut, sehingga tata kelola pembayaran kompensasi lebih terukur sepanjang tahun. Dengan kondisi keuangan yang lebih sehat, Pertamina dan PLN juga berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga energi bersubsidi — terutama di tengah lonjakan harga minyak akibat gejolak geopolitik global.

Ketahanan Pangan dan MBG Memperkuat Fondasi Ekonomi

Selain menjaga stabilitas jangka pendek, belanja negara juga diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di antaranya melalui anggaran ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis. Realisasi anggaran ketahanan pangan hingga 30 April 2026 mencapai Rp61,3 triliun (29,1% pagu), disalurkan melalui belanja K/L, subsidi pupuk, dan investasi kepada BULOG. Melalui investasi ke BULOG, pemerintah telah menyerap gabah 3,5 juta ton, beras 13,9 ribu ton, dan jagung 2,1 ribu ton dari petani. Penguatan serapan hasil panen domestik ini penting untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan, membantu stabilitas harga di tingkat konsumen, serta memberikan kepastian pasar dan perlindungan pendapatan bagi petani.

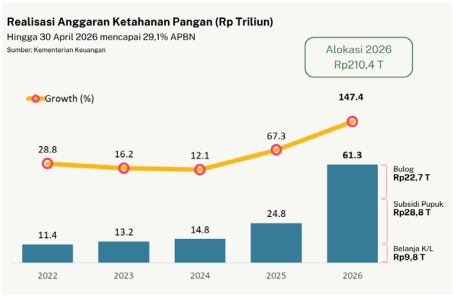


Foto: Kolbin Salim

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis juga terus disempurnakan dengan realisasi anggaran hingga April mencapai Rp75,0 triliun (22,4% dari pagu). Program ini telah berhasil menjangkau 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi, tetapi juga menciptakan efek berganda pada ekonomi daerah melalui permintaan bahan pangan, distribusi logistik, penyediaan jasa, dan penyerapan tenaga kerja setempat.

Pembiayaan Terukur Menjaga Kredibilitas Fiskal

Defisit APBN 2026 dirancang sebagai instrumen *countercyclical* untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli, dan mendukung program prioritas. Karena itu, pembiayaan APBN tidak hanya dilihat sebagai instrumen untuk menutup kebutuhan defisit, tetapi juga sebagai bagian dari strategi fiskal yang telah dirancang secara terukur sejak awal tahun.

Hingga April 2026, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp298,5 triliun (43,3% target), terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp305,5 triliun dan pembiayaan non-utang negatif Rp7,0 triliun. Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan berjalan *on track* untuk mendukung pengelolaan APBN yang kredibel dan akuntabel.

Pembiayaan utang dikelola secara pruden dengan memperhatikan likuiditas kas pemerintah dan dinamika pasar keuangan global. Di pasar perdana, *bid-to-cover ratio* lelang April kembali naik menjadi 1,91x dari 1,57x pada bulan sebelumnya. Pasar SBN juga mencatat *net inflow* Rp13,4 triliun pada April dan Rp1,5 triliun di awal Mei, menjadi sinyal bahwa kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi dan kredibilitas fiskal tetap terjaga.

Di sisi non-utang, Pemerintah terus mengoptimalkan pembiayaan investasi untuk mendukung sektor-sektor strategis. Realisasi pengeluaran investasi hingga April mencapai Rp35,45 triliun, yang disalurkan untuk BULOG sebesar Rp22,73 triliun guna mendukung cadangan pangan nasional; LMAN sebesar Rp5,58 triliun untuk pengadaan lahan PSN jalan tol; FLPP sebesar Rp5,0 triliun untuk mendukung program penyediaan rumah; serta PT SMI Rp1,14 triliun untuk pembiayaan infrastruktur layanan dasar di daerah melalui skema *creative financing*. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan Rp1 triliun melalui BPDLH sebagai *pooling fund* untuk mitigasi risiko bencana.

APBN Menjaga Momentum di Tengah Risiko Global

Hingga April 2026, APBN terus dioptimalkan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Kinerja penerimaan negara yang tetap kuat, belanja yang dipercepat dan lebih terarah, serta pembiayaan yang dikelola secara pruden memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, mendukung aktivitas sektor riil, dan mempertahankan kepercayaan pasar.

Ke depan, Pemerintah akan terus mencermati berbagai risiko global, terutama yang berkaitan dengan harga energi, nilai tukar, pasar keuangan, dan perdagangan dunia. Dalam kondisi global yang masih dinamis, APBN akan terus dijaga tetap sehat, adaptif, dan kredibel agar mampu menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

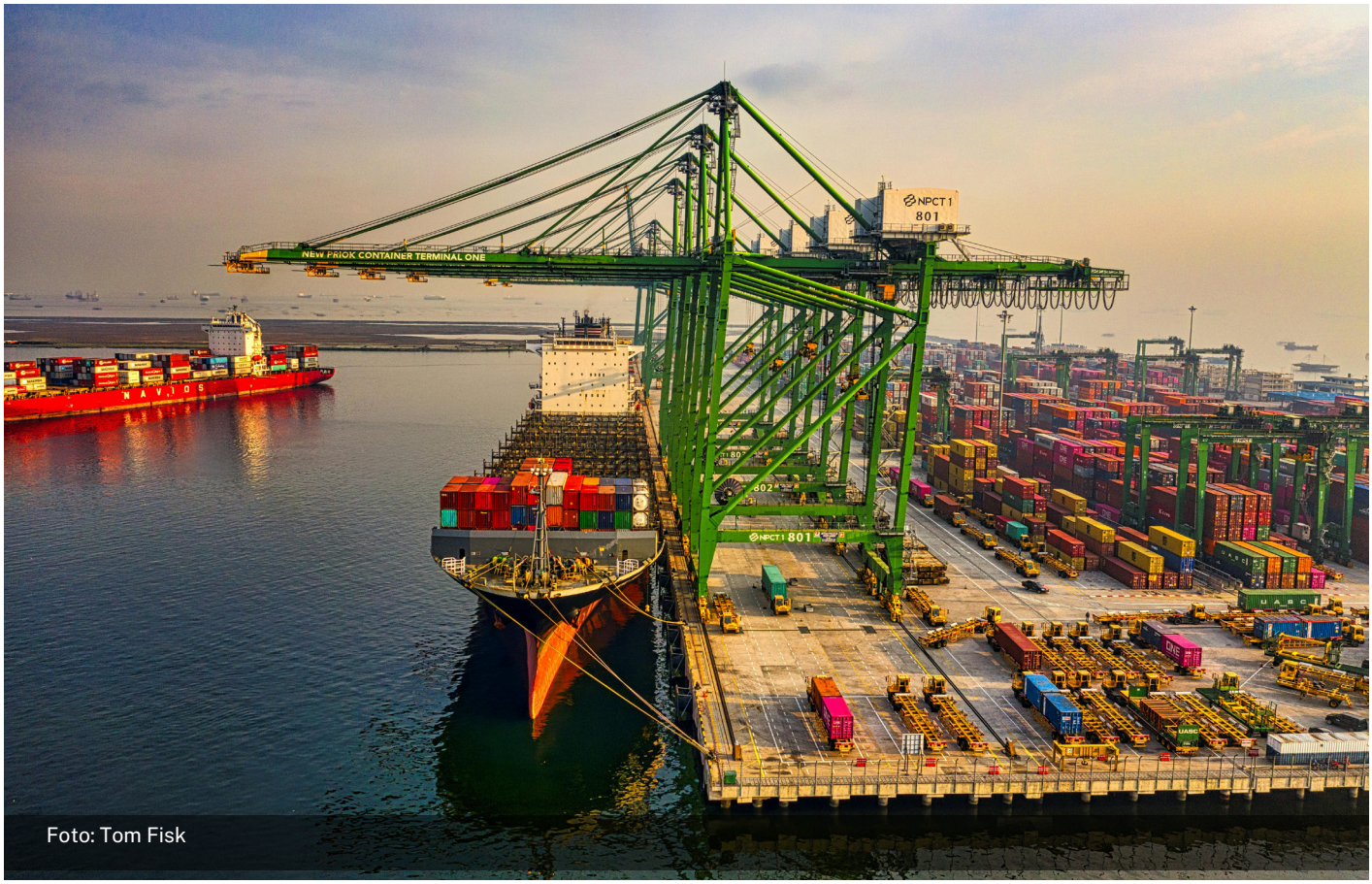

Foto: Tom Fisk

NEWSLETTER

APBN KiTA

KINERJA DAN FAKTA

Newsletter ini merupakan versi ringkas dari Paparan Menteri Keuangan pada Konferensi Pers APBN KiTa. Publik dapat mengakses diseminasi APBN KiTa lainnya, yaitu Bahan Paparan dan Buku APBN KiTa melalui QR Code yang tersedia di halaman ini.

Temukan versi APBN KiTa selengkapnya di sini.

Narahubung media:

Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi
Kementerian Keuangan
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
+62813-1000-4134

Hidayat Amir
Direktur Strategi dan Portofolio
Pembiayaan
Kementerian Keuangan
sekretariat.alco@kemenkeu.go.id
+62821-2484-9458

Edisi VIII | Mei 2026 disusun oleh:
Aulia Wahyu M. (Penulis), Chairul Adi (Editor),
I Gede Yuddy Hendranata (Penanggung Jawab) dan Aditya W. (Cover)
Tim Sekretariat ALCO Kementerian Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF